



Penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Pada Pemerintah Desa Di Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember

Ana Pratiwi

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Jember

Correspondence : anapратиwi@uinkhas.ac.id

Abstract

This research is a quantitative research with the population of all village officials in the Bangsalsari district. Determination of the sample using a saturated sample where entire population is used as a sample. This study examines the effect of system quality and information quality will affect user satisfaction. This research results that the quality of the system has no significant effect on user satisfaction, while the quality of information has a significant effect on user satisfaction. This can happen because the respondents think that the quality of the system in government agencies tends to be less good, while the information system itself is considered to be able to increase satisfaction due to the times that support the quality of the information system to be good.

Keywords : *Quality Of System, Quality Of Information, User Satisfaction*

Abstrak

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan populasi seluruh aparatur desa di kecamatan Bangsalsari. Penentuan sampel menggunakan sampel jenuh, yaitu seluruh populasi dipergunakan sebagai sampel. Penelitian ini menguji pengaruh kualitas sistem dan kualitas informasi akan berpengaruh pada kepuasan pengguna. Penelitian ini menghasilkan bahwa kualitas sistem tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pengguna, sedangkan kualitas informasi berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pengguna. Hal ini dapat terjadi diakibatkan para responden menganggap bahwa kualitas sistem pada instansi pemerintahan cenderung kurang begitu baik, sedangkan untuk sistem informasi itu sendiri dianggap dapat meningkatkan kepuasan dikarenakan zaman yang mendukung adanya kualitas sistem informasi menjadi baik.

Kata kunci : Kualitas Sistem, Kualitas Informasi, Kepuasan Pengguna

1. Pendahuluan

Desa merupakan satuan terkecil dari pemerintahan daerah. Dalam perundang-undangan tentang desa yaitu UU No 6 Tahun 2014 (Bender, 2016), desa dengan jelas diartikan sebagai suatu kesatuan masyarakat berdasarkan hukum atau adat yang memiliki garis batas kewenangan untuk mengurus serta mengatur permasalahan pemerintahan, kepentingan masyarakatnya berdasarkan hak-hak masyarakat tersebut seperti hal hak asal muasal mereka, hak tradisional yang diakui dan dihormati oleh peraturan pemerintahan atau pemerintah adat yang tentunya harus diakui oleh Negara. Undang-undang tentang Desa, yaitu UU nomor 6 Tahun 2014 memberi mandat kepada aparatur desa dimana bias kita sebut sebagai pemerintah desa untuk mempersiapkan desanya agar lebih independent. Independent disini adalah, pemerintah desa dapat mengolah Sumberdaya alam (SDA) yang dimiliki desa dan mengelola pemerintahan dengan baik. SDA ini mencakup didalamnya kekayaan milik desa, dapat berupa kekayaan alam, tokoh terkenal ataupun situs budaya yang ada di desa, dan mengelola keuangan desa (BPK RI, 2015). Dalam Permen Nomor 113 tahun 2014, telah jelas tertuang bahwa pengelolaan keuangan desa, haruslah sesuai dengan apa yang telah di tulis dalam Permen ini. Dalam permen ini, dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa ini adalah hak beserta kewajiban desa, yang dalam hal ini diwakilkan oleh aparatur desa, diukur dengan sejumlah uang atau segala sesuatu yang dapat dalam bentuk uang dan barang-barang yang berkaitan dengan pelaksanaan hak serta kewajiban desa. Selain itu, pemerintah desa saat ini



tidak lagi mengelola dana taktis kecil, tetapi mengelola dan yang besar, hal ini dikarenakan adanya UU Otonomi Daerah yang mengharuskan Desa untuk memiliki otonomi sendiri atas pengembangan dan pengelolaan sumber daya yang dimiliki, baik sumberdaya keuangan, alam dan sumberdaya manusia. Dengan adanya pengelolaan dana yang besar, sangat dimungkinkan bawah SDM yang dimiliki oleh desa sebagai aparatur desa, haruslah memiliki kemampuan yang baik serta mempunyai mutu yang unggul dalam mengelola dana taktis desa dengan tujuan mensejahterakan penduduk desa (Kurnianto et al., 2019).

Melaksanakan pengelolaan keuangan desa, haruslah sesuai dengan aturan-aturan yang ada di negara. Aturan tersebut dapat tertuang dalam peraturan presiden ataupun peraturan Menteri. Peraturan tentang pengelolaan keuangan desa, tertulis dalam Perndagri nomor 113 tahun yang dibuat pada tahun 2014 (JDIH BPK, 2014). Dalam permendagri tersebut, telah dijelaskan bahwa penyelenggaraan tata Kelola keuangan desa dapat berupa semua hak-hak beserta kewajiban-kewajiban yang dimiliki oleh desa yang dapat pula diukur dengan sejumlah uang dan semua yang dapat berupa uang ataupun barang-barang yang dapat terpengaruh dari pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Misalnya perlengkapan dan peralatan kantor. Dilain sisi, penyelenggaraan tata Kelola keuangan desa dapat didefinisikan sebagai suatu rentetan pelaksanaan kegiatan yang akan dilewati yang akan diawali dengan proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan serta mempertanggungjawabkan apapun rencana yang telah terlaksana dalam satu periode yang berlaku. Umumnya periode tersebut akan dimulai di bulan Januari dan akan berakhir di bulan Januari, sampai dengan Desember. Permendagri ini juga akan mengamanahkan bahwa desa wajib mempertanggungjawabkan dengan cara membuat Laporan Realisasi dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Agar sistem pengelolaan negara berjalan dengan baik, maka pemerintah negara Indonesia haruslah tetap menjaga kepercayaan publik agar tetap ada. Cara untuk menjaganya adalah dengan cara lebih bertanggung jawab, transparan serta merespon kebutuhan penduduknya yang sangat dinamis dengan cepat dan tanggap. Pengelolaan keuangan desa melalui tata kelola keuangan desa yang baik akan membuat pemerintahan desa menjadi akuntabel dan transparan. Untuk mendukung tata kelola keuangan desa agar dapat berjalan dengan baik, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menciptakan suatu sistem yang akan mendukung pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban desa. Sistem tersebut dinamakan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA). Sistem ini diharapkan akan membantu pengelolaan keuangan desa yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, mudah digunakan dan berkesinambungan dalam pengembangannya (BPKP, 2018).

Dengan dikembangkannya sebuah sistem, tentunya akan timbul dua kemungkinan. Kemungkinan bahwa penerapan sistem tersebut gagal ataupun sukses. Kegagalan penerapan sistem umumnya terjadi pada kekegagalan teknis yang berupa kesalahan logik ataupun informasi dan dapat pula kegagalan non teknis yang umumnya berhubungan dengan SDM yang menggunakan sistem tersebut yang mendukung sistem ataupun tidak mendukungnya sehingga enggan menggunakan sistem. Sedangkan keberhasilan dalam menerapkan suatu sistem dapat diukur dengan ketercapaian dari tujuan pembuatan aplikasi tersebut, dalam aplikasi SIMDA ini, tujuannya adalah tercapainya pengelolaan keuangan desa yang efektif dan efisien sehingga dapat meningkatkan kualitas sistem yang dimiliki oleh pemerintah.

Kualitas sistem yang baik akan membuat penggunaan menghasilkan rasa puas yang tinggi dalam menggunakannya dan akan berdampak pada produktivitas SDM yang menggunakan sistem tersebut. Jika produktivitas naik, maka tujuan organisasi juga akan tercapai dengan mudah. Analisa tentang keberhasilan suatu sistem informasi dalam suatu lembaga/instansi pernah dilakukan, hal ini dilakukan untuk menemukan ataupun menghambangkan konsep untuk rerangka pemutakhiran sistem ataupun untuk membuat sistem yang baru. Kesuksesan Sistem Informasi adalah sebuah konstruksi multidimensi dan saling



bergantung dan oleh karena itu perlu dipelajari keterkaitan antar dimensi atau untuk mengendalikan dimensi tersebut.

Studi empiris tentang apakah suatu sistem telah efektif untuk digunakan telah banyak dilakukan. Pertanyaan teoritis yang umumnya dipertanyakan adalah apakah kualitas suatu sistem telah baik dan sukses untuk diterapkan. Dua orang peneliti yang berasal dari Eropa yaitu DeLone dan McLean telah mengkategorikan bahwa kategori dalam dimensi model yang dapat mengukur keberhasilan sistem. Kategori-kategori tersebut antara lain adalah kualitas dari sistem itu sendiri, kualitas informasinya, penggunaannya, kepuasan penggunaannya, dampak kepada individu serta dampak kepada organisasinya (DeLone & McLean, 2003). Dapat ditarik kesimpulan dari keenam kategori tersebut bahwa kualitas sistem yang baik dapat dilihat dari apakah kualitas sistem dan kualitas informasinya baik, apakah setelah sistem dan informasi tersebut baik lalu secara otomatis pelanggan juga akan puas. Apakah sistem tersebut juga akan mempengaruhi kinerja SDM dalam menjalankannya. Lalu yang terakhir apakah sistem tersebut akan mampu membuat dampak yang baik untuk para individu dalam organisasi yang jika ini berdampak baik tentu saja akan berdampak baik pula kepada organisasi.

SIMDA mulai launching pada pertengahan tahun 2006, tepatnya pada tanggal 29 Agustus. Bersama dengan Standart Akuntansi Pemerintahan (SAP) (Pemerintah, 2003), diharapkan SIMDA ini dapat menghasilkan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa yang sesuai dengan standart akuntansi pemerintahan yang berlaku. Dengan hadirnya SIMDA ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas pertanggungjawaban dan laporan keuangan. Sehingga laporan keuangan desa diharapkan akan lebih efektif dan efisien, tepat waktu dalam pembuatannya serta bisa lebih transparan karena pemerintah desa juga diwajibkan untuk mengumumkan laporan keuangannya kepada masyarakat (Sapty Rahayu et al., 2018). Beberapa penelitian telah dilakukan untuk mengukur apakah kualitas sistem telah baik dan tepat guna, diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Mohune pada tahun 2013. Penelitian ini menghasilkan bahwa penerapan SIMDA berpengaruh positif dan signifikan dalam pelaporan keuangan. Hal ini mengindikasikan bahwa SIMDA dapat menjadi suatu aplikasi yang baik dalam membantu mengelola keuangan desa (Riski Siswanto Mohune, 2013). Namun, penggunaan SIMDA sebagai sistem informasi manajemen keuangan pada seluruh desa yang ada di Indonesia adalah sebuah mandatori atau sebuah keharusan. Hal ini mengakibatkan, para perangkat desa tidak dapat membandingkan sistem informasi keuangan lainnya selain SIMDA. Perspektif inilah yang membutuhkan penelitian yang lebih dalam lagi untuk dilakukan.

Dari pemaparan diatas, topik tentang penggunaan sistem manajemen keuangan daerah ini apakah sudah berjalan dengan baik di salah satu kecamatan di Kabupaten Jember perlu untuk dilakukan. Sehingga nantinya penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat kepada pemerintah desa ataupun pemerintah pusat untuk pengembangan sistem informasi keuangan yang dikembangkan. Selain itu, diharapkan penerappan sistem ini akan meningkatkan kualitas pelaporan keuangan menjadi baik.

2. Tinjauan Pustaka Dan Hipotesis

2.1. Kesuksesan Sistem Informasi

Suatu sistem yang dapat berjalan dengan efektif dan efisien mengindikasikan bahwa proses penerapan sistem informasi telah berhasil dan berjalan dengan baik. Untuk melihat tingkat keefektifan suatu sistem apakah telah berjalan dengan baik maka digunakan beberapa pengukuran, diantaranya adalah dampak yang tampak dari penggunaan sistem tersebut. Kesuksesan suatu sistem umumnya terlihat dari tingginya jejak pendapat dari penggunaan sistem tersebut dan parameter lain yang digunakan dalam pengukuran kesuksesan. Sedangkan kepuasan dari pengguna sistem informasi dapat dilihat dan diukur dari pengisian kuisioner ataupun wawancara user (Arifiantika, 2015).



Tingginya kemungkinan keberhasilan suatu sistem dapat ditingkatkan melalui mengantisipasi permasalahan dalam penggunaan sistem yang sangat dimungkinkan terjadi. Kesalahan dalam membaca manualbook juga menjadi permasalahan utama selain dari keengganan penggunaan sistem. Jika permasalahan-permasalahan ini dapat dimitigasi dengan baik, makankesuksesan suatu sistem tidaklah mustahil untuk dicapai.

2.2. SIMDA Keuangan

BPKP merupakan internal auditor pemerintahan baik pusat ataupun daerah. BPKP selain bertugas untuk mengendalikan pengelolaan keuangan yang ada di pemerintahan, juga bertugas untuk menyediakan suatu alat untuk mempermudah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan pusat/daerah. Slaah satu langkah yang dilakukan BPKP untuk melaksanakan tugasnya adalah dengan mengembangkan aplikasi yang bernama SIMDA. SIMDA disini adalah suatu sistem informasi yang dirancang dan dikembangkan sehingga kemudian dapat digunakan untuk proses dari penyusunan APBD hingga pelaporan penggunaan anggaran dan pembangunan negara (Kepmendagri, 2002).

Laporan keuangan yang akuntabel dan transparan serta dapat dilaporkan tepat waktu, akurat, jelas, lengkap serta dapat dipergunakan sesuai ketentuannya sehingga akan tercipta tata kelola pemerintahan yang baik hingga penyelenggaraan tata kelola keuangan yang baik merupakan tujuan dari pemerapan SIMDA ini. Hal ini merupakan langkah awal juga pemerintah dalam menyambut penerapan otoda yang dimulai dari awal thun 2000an hingga sekarang masih kurang bisa mengelola dengan efektif dn efisien (BPKP, 2018) .

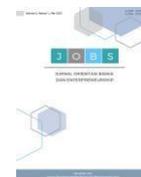
2.3. Model Kesuksesan Sistem Informasi DeLone dan McLean

Model kesuksesan yang dibuat oleh DeLone dan McLean menjelaskan tentang model kesuksesan sistem informasi yang telah dikategorikan dalam dimensi model yang dapat mengukur keberhasilan sistem. Kategori-kategori tersebut antara lain adalah kualitas dari sistem itu sendiri, kualitas informasinya, penggunaannya, kepuasan penggunaannya, dampak kepada individu serta dampak kepada organisasinya. Dapat ditarik kesimpulan dari keenam kategori tersebut bahwa kualitas sistem yang baik dapat dilihat dari apakah kualitas sistem dan kualitas informasinya baik, apakah setelah sistem dan informasi tersebut baik lalu secara otomatis pelanggan juga akan puas. Apakah sistem tersebut juga akan mempengaruhi kinerja SDM dalam menjalankannya . Lalu yang terakhir apakah sistem tersebut akan mampu membuat dampak yang baik untuk para individu dalam organisasi yang jika ini berdampak baik tentu saja akan berdampak baik pula kepada organisasi (DeLone & McLean, 2003) .

2.4. Hubungan kualitas sistem (X1) terhadap kepuasan pengguna (Y)

Sistem adalah suatu kombinasi anantara perangkat keras dan perangkat lunak yang baik, sehingga dapat menghasilkan sistem yang berkualitas, dengan begitu sistem infomasi akan dapat menjadi pemicu untuk meningkatkan kinerja (Suparjo, 2017). Selain itu kualitas sistem yang baik akan membuat penggunaannya merasa mudah dalam mengoperasikannya. Dari uraian diatas dapat kita ketahui bahwa kualitas dari suatu sistem merupakan suatu ciri khas dari informasi yang melekat pada sistem itu sendiri.

Dari uraian diatas dapat dikatakan bahwa jika suatu sistem itu baik, maka pengguna akan merasa puas, hal ini terjadi karena ciri suatu sistem informasi yang baik adalah jika pengguna suatu sistem tersebut merasa tidak sulit untuk menggunakannya. Jadi kualitas sistem akan berbanding lurus dengan kepuasan pengguna. Hal ini dibuktikan dari adanya penelitian yang dilakukan oleh Janis Arifiantika (2015). Penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas sistem berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pengguna (Arifiantika, 2015). Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Anisa Dwi Handini menghasilkan hasil yang sama. Dari uraian diatas dapat disusun suatu hipotesis sebagai berikut:



H₁ : Kualitas sistem berpengaruh terhadap kepuasan pengguna

2.5. Hubungan kualitas informasi(X₂) terhadap kepuasan pengguna (Y)

Keluaran dari suatu sistem adalah informasi. Jika suatu sistem berkualitas baik, maka kualitas informasi juga akan baik. Suatu sistem yang digunakan suatu organisasi akan menghasilkan informasi, seperti SIMDA ini menghasilkan keluaran laporan keuangan berdasarkan SAP. Informasi yang akurat, memiliki tingkat reabilitas yang tinggi serta tepat waktu dalam diumumkannya mengindikasikan bahwa suatu informasi tersebut berkualitas. Hasil keluaran berupa kualitas informasi yang baik membuat pemakai dari sistem tersebut menjadi percaya akan sistem itu. Jika kepercayaan pengguna sistem meingkat, maka diharapkan akan menjadi pemicu dari peningkatan kinerja pengguna sistem, sehingga tujuan individu dan organisasi akan tercapai. Penelitian tentang hubungan kualitas informasi dan kepuasan pengguna telah dilakukan, diantaranya oleh Anisa Dwi Handini (2017) yang menunjukkan bahwa ada pengaruh positif signifikan terhadap hubungan ini. Janis Arifiantika (2015) juga menyatakan adanya pengaruh antara kualitas informasi dan kepuasan pengguna sistem (Arifiantika, 2015). Dari uraian ini dapat terlihat adanya hubungan sebab akibat dari kedua variabel ini, maka dapat disusun suatu hipotesis seperti berikut:

H₂ : Kualitas informasi berpengaruh terhadap kepuasan pengguna.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan kuantitatif dan jenis penelitian menggunakan jenis penelitian *field research*. Dengan populasi adalah seluruh anggota perangkat desa di seluruh Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember yaitu sebanyak 40 orang. Sedangkan sample dalam penelitian ini adalah sampel jenuh karena semua jumlah populasi digunakan sebagai sampel (Sumarni dan wahyuni, 2018). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menyebarkan kuisional kepada perangkat desa yang ada di Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember. Data yang digunakan adalah data primer yang bersumber dari penyebaran kuisioner atau angket kepada 40 orang pegawai di desa-desa yang ada di Kecamatan Bangsalsari, Jember.

Dalam penelitian ini, kualitas sistem dan kualitas informasi merupakan variable bebas sedangkan kepuasan pengguna merupakan variable terikat. Penelitian ini meneliti apakah sistem yang ada untuk dijalankan sekarang ini telah mencapai suatu kualitas yang baik sehingga pengguna dari sistem ini, yaitu para perangkat desa, telah puas dalam menggunakannya. Metode analisis dari penelitian ini adalah MRA atau *Moderate Regression Analysis*.

4. Hasil Penelitian

Dari proses pengolahan data menggunakan SPSS 22 maka dapat dirangkum bahwa penelitian ini menghasilkan hasil penelitian sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Penelitian

Model	Koefisien	T	Sig.
Konstanta	4.048	1.234	.225
Kualitas Sistem	.195	1.418	.165
Kualitas Informasi	.630	4.602	.000
Adj. R Square	.406		

Sumber: Data Diolah



Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persamaan regresi yang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \epsilon$$

$$Y = 4.048 + 0.195 X_1 + 0.630 X_2 + \epsilon$$

Dari hasil persamaan regresi linier berganda di atas dapat dijelaskan bahwa:

- Koefisien konstan (Nilai Konstanta) dari penelitian ini adalah sebesar 4.048 menyatakan bahwa kualitas sistem dan kualitas informasi adalah satu (konstan) maka kepuasan dari pengguna akan naik sebesar 4.048 satuan yang dapat disimpulkan bahwa salam persamaan ini ada pengaruh negatif yang terjadi.
- Untuk hubungan antara X1 dan Y, dihasilkan koefisien sebesar 0.195 satuan maka jika kualitas sistem menunjukkan adanya kenaikan sebesar satu satuan maka kepuasan pengguna akan naik juga sebesar 0.195 satuan dengan asumsi variabel lain dalam keadaan konstan.
- Hubungan antara kualitas informasi dan kepuasan pengguna sistem menyatakan adanya koefisien sebesar 0.630. hal ini mengindikasikan bahwa jika variabel lain dalam keadaan konstan, dan kualitas informasi mengalami kenaikan satu satuan maka kepuasan pengguna akan naik sebesar 0.630 satuan.
- Variabel kualitas sistem tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pengguna sistem, hal ini terlihat dari signifikansi uji t yang dilakukan, yaitu menunjukkan nilai 0.165 dimana hasil ini adalah lebih besar dari 0.05. Standart eror yang digunakan dalam penelitian ini adalah 0.05 atau 5%.
- Variabel kualitas informasi berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pengguna sistem, hal ini terlihat dari signifikansi uji t yang dilakukan, yaitu menunjukkan nilai 0.00 dimana hasil ini adalah lebih kecil dari 0.05. Standart eror yang digunakan dalam penelitian ini adalah 0.05 atau 5%.
- Perhitungan adj. R Square menunjukkan nilai sebesar 0.406 atau 40.6% hal ini mengindikasikan bahwa kualitas sistem dan kualitas informasi mampu mempengaruhi kepuasan pengguna sistem sebesar 40.6% sementara sisanya yaitu sebesar 59.4% dipengaruhi variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Adj. R Square digunakan untuk menentukan pengaruh keseluruhan Variabel X terhadap variabel Y karena, adj. R Square lebih stabil dalam perubahannya tidak mengikuti banyaknya variabel yang diteliti.

5. Pembahasan

Pengaruh Kualitas Sistem Terhadap Kepuasan Pengguna Sistem

Kualitas sistem informasi tidak mempengaruhi kepuasan pengguna sistem disini, hal ini terlihat dari signifikansi uji t yang dilakukan dalam penelitian ini, penelitian-penelitian sebelumnya yang dilakukan diantaranya oleh Anisa Dwi Handini (2017) dan Janis Arifiantika (2015) menunjukkan bahwa kualitas sistem berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pengguna menunjukkan hasil yang berbeda dengan penelitian ini. Hal ini dapat dimungkinkan dikarenakan penggunaan sistem pada organisasi pemerintahan bersifat *mandatory* atau wajib. Jadi jika kita berada di organisasi pemerintah, kita diwajibkan untuk menggunakan sistem yang telah ditentukan dan diseragamkan untuk tujuan sersamaan standart dalam pelaporan dan pengelolaannya.

Saat suatu sistem wajib digunakan maka, para pengguna sistem tersebut tidak akan mempersoalkan tentang kepuasan mereka dalam menjalankan sistem tersebut, seperti pada SIMDA ini. Sistem ini wajib digunakan pada pengelolaan keuangan desa, maka para pengguna dari sistem ini merasa hal ini diwajibkan dan kepuasan mereka menjadi tidak terpengaruh dengan adanya sistem ini karena proses pengelolaan dan pelaporan keuangan



desa tetap harus dilakukan meskipun mereka merasa puas atau tidak dengan adanya sistem tersebut.

Pengaruh Kualitas Informasi Terhadap Kepuasan Pengguna Sistem

Pada hipotesis kedua, hasil pengolahan data menunjukkan bahwa penggunaan SIMDA Keuangan dapat mempengaruhi kualitas informasi yang dihasilkan. Sehingga kepuasan pengguna juga akan meningkat. Hasil penelitian ini ditemukan signifikan dan positif. Hal ini menunjukkan bahwa para pengguna SIMDA Keuangan merasa mudah dalam melakukan pengelolaan keuangan serta mudah juga dalam melaporkan pelaporan pengelolaan keuangan. Pengguna sistem umumnya merasa SIMDA Keuangan memberi manfaat yang baik untuk mereka, keluran berupa informasi yang tepat waktu, reliabel dan dapat dibandingkan dengan desa, kecamatan bahkan kabupaten lainnya mempermudah mereka dalam membuat laporan penggunaan dan pengelolaan keuangan desa.

Penggunaan sistem ini diharapkan akan meningkatkan kinerja pengguna sistem ini, jika kinerja pengguna sistem meningkat diharapkan kinerja organisasi juga akan meningkat sehingga tujuan organisasi akan tercapai. Lebih luar lagi tata kelola negara Indonesia akan lebih baik lagi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sigit Kurnianto dkk (2019) yang menyatakan bahwa kualitas informasi berpengaruh positif terhadap kepuasan pengguna, serta penelitian yang dilakukan penelitian Mia Triandhini (2018) juga membuktikan bahwa kualitas informasi berpengaruh terhadap kepuasan pengguna.

6. Kesimpulan

Bersumber dari paparan serta hasil penelitian hingga pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan Sistem Manajemen Keuangan desa dengan menggunakan SIMDA keuangan pada desa yang ada di kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaruh antara kualitas sistem dan kepuasan pengguna SIMDA Keuangan berpengaruh positif tetapi tidak signifikan dengan nilai signifikansi 0.165 dimana standart error yang digunakan adalah 5%. Hasil ini sejalan dengan beberapa penelitian lain yang menunjukkan hasil yang sama. Hipotesis pertama dalam penelitian ini ditolak karena pengaruh yang tidak signifikan. Hal ini dimungkinkan bahwa penggunaan SIMDA Keuangan di desa adalah wajib, sehingga pengguna sistem tidak begitu memperhatikan kepuasan penggunaannya terhadap sistem itu sendiri.
2. Pengaruh kualitas informasi dan kepuasan pengguna SIMDA Keuangan berpengaruh positif dan signifikan. Hal ini terbukti dengan hasil uji t yang menunjukkan signifikansi sebesar 0.00 dengan standart error sebesar 5%. Hal ini sejalan dengan beberapa penelitian yang menunjukkan hubungan positif signifikan antara kedua variabel tersebut. Justifikasi kenapa kedua variabel ini berhubungan positif signifikan adalah karena pengguna sistem SIMDA Keuangan merasa puas akan kualitas informasi yang dihasilkan oleh sistem tersebut. Hal ini dikarenakan penggunaan sistem ini akan mempermudah dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan desa. Pembuatan rancangan penggunaan keuangan desa serta pelaporan akuntansi yang sesuai dengan SAP akan terbantu dengan adanya sistem ini. Dan pelaporan tersebut juga akan dapat sesuai standart serta dapat di bandingkan dengan pelaporan Keuangan desa-desa lainnya.

Temuan ini dapat memberikan implikasi penting bagi pemerintah kita ataupun bagi pengguna sistem Keuangan ini. Bagi pemerintah, penelitian ini dapat memberikan saran atas pengembangan sistem Keuangan ataupun sistem-sistem lainnya yang digunakan untuk organisasi pemerintahan. Pengembangan haruslah terus dilakukan, pembuatan sistem yang

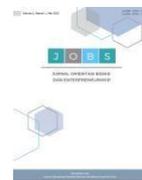


mudah dijalankan serta menghasilkan informasi yang berkualitas menjadi tujuan utama. Sehingga ada sinergi antara pembuat sistem dalam hal ini pemerintah dan pengguna sistem dalam hal ini SDM yang dimiliki organisasi pemerintahan. Pengaplikasian sistem yang mudah akan memberi suntikan semangat bagi pengguna sistem sehingga kinerja SDM di organisasi pemerintahan akan meningkat. Jika kinerja meningkat akan membuat tujuan organisasi dan lebih jauh lagi tujuan negara akan tercapai. Selain itu, proses pengamanan dalam pembuatan sistem yang aman akan membuat kualitas dari sistem tersebut menjadi lebih baik.

Untuk pengguna sistem Manajemen keuangan desa, penggunaan sistem menaglah suatu keharusan dan kewajiban untuk mewujudkan tata kelola yang baik. Pengguna sistem atau pelaksana dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan haruslah mau belajar dan terbuka terhadap perubahan. Adanya sistem-sistem seperti ini tujuannya adalah untuk mempermudah pengelolaan keuangan dan untuk menghasilkan pelaporan (informasi) yang kredibel, cepat dan sesuai dengan standart. Keberadaan sistem-sistem seperti SIMDA ini akan terus kita gunakan dan temu dalam rangka memperbaiki tata kelola pemerintahan yang baik serta untuk mewujudkan tujuan organisasi dan negara.

Daftar Pustaka

- Arifiantika, J. (2015). Analisis Tingkat Keberhasilan Penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah Melalui Model Delone and Mclean. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi Edisi Khusus Juni, 11*, 94–101.
- Bender, D. (2016). DESA - Optimization of variable structure Modelica models using custom annotations. *ACM International Conference Proceeding Series, 18-April-2(1)*, 45–54. <https://doi.org/10.1145/2904081.2904088>.
- BPK RI. (2015). Pendapat BPK: Kesiapan Pemerintah dalam Pelaporan Keuangan Berbasis Akrua Tahun 2015. *Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesiaakarta: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia*, 1–21.
- BPKP. (2018). Petunjuk Pengoperasian Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes 2.0). *Bpkp.Go.Id*, 1–123. [http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/sakd/files/Pedoman_Keudes\(4\).pdf](http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/sakd/files/Pedoman_Keudes(4).pdf)
- DeLone, W. H., & McLean, E. R. (2003). The DeLone and McLean model of information systems success: A ten-year update. *Journal of Management Information Systems, 19(4)*, 9–30. <https://doi.org/10.1080/07421222.2003.11045748>.
- JDIH BPK. (2014). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. *Peraturan.Bpk.Go.Id, 51(1)*, 51. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/111736/permendagri-no-113-tahun-2014>.
- Kepmendagri. (2002). Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah Dan Penyusunan Perhi. *Kementerian Dalam Negeri*, 1–35.
- Kurnianto, S., Kurniawansyah, D., & Ekasari, W. F. (2019). Menilai Keberhasilan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes): Validasi Model Keberhasilan Sistem Informasi Delone Dan Mclean. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga, 4(2)*, 687–706. <https://doi.org/10.31093/jraba.v4i2.177>.
- Pemerintah, konsep tual. (2003). *DHendianto-BiroHukum BPK-RI/5/26/2008 1. 1*, 1–40.
- Riski Siswanto Mohune. (2013). Praktik Penyelesaian Sengketa di Bidang Kontrak Bisnis Perusahaan. *Lex Privatum, 1(1)*, 104–114.
- Sapty Rahayu, F., Aprilianto, R., & Sigit Purnomo Wuryo Putro, Y. (2018). Analisis Kesuksesan Sistem Informasi Kemahasiswaan (SIKMA) dengan Pendekatan Model DeLone dan McLean. *Indonesian Journal of Information Systems, 1(1)*, 34–46. <https://doi.org/10.24002/ijis.v1i1.1704>.



- Suparjo. (2017). Media Ekonomi Dan Manajemen. *Media Ekonomi Dan Manajemen*, 32(2), 137–153.
- Murti Sumarni; Oktaviani Hastu Sudyarto; Salamah Wahyuni. (2006). *Metodologi penelitian bisnis/ Murti Sumarni, Salamah Wahyuni ; editor, Oktaviani Hastu Sudyarto*. Yogyakarta : Andi.